

ABSTRAK

Dian Irmayanti, 2017. *Fungsi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Kader Untuk Meningkatkan Kualitas Calon Anggota Legislatif di DPRD (Studi Di DPW PKS Jawa Barat).* Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi kader telah diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Melalui pendidikan politik seharusnya terdapat adanya peningkatan kualitas kader partai. Namun pada kenyataannya, praktek pendidikan politik di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya partai politik yang melahirkan kader-kader yang duduk di lembaga legislatif khususnya di DPRD melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara dan masyarakat, salah satunya banyak kader partai yang terjerat tindak korupsi.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan menganalisis landasan dan program pendidikan politik di PKS Jawa Barat; (2) untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pendidikan politik di PKS Jawa Barat terhadap kualitas calon anggota legislatif; (3) untuk mengetahui dan menganalisis relevansi antara pendidikan politik di PKS Jawa Barat dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa pelaksanaan yang berurusan dengan negara didasarkan kepada beberapa prinsip yaitu: prinsip amanah, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan, prinsip kebebasan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di DPW PKS Jawa Barat. Kemudian teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu wawancara langsung dengan pengurus DPW PKS Jawa Barat dan studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Landasan pendidikan politik PKS Jawa Barat dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AD/ART yang menjadi aturan dasar PKS, juga melihat kepada hasil Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil). Sedangkan untuk program pendidikan politik bagi kader di PKS Jawa Barat telah dilaksanakan secara maksimal (2) Kontribusi yang diberikan terhadap kualitas calon anggota legislatif melalui pendidikan politik PKS Jawa Barat masih belum besar karena hanya lima karakter yang dicapai dari sepuluh karakter muslim yang menjadi acuan PKS dalam menetapkan kadernya untuk bisa menjadi calon anggota legislatif; (3) Relevansi pendidikan politik di PKS Jawa Barat dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yaitu sejalan dengan prinsip amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan.